

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban oleh pemerintahan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (otonomi daerah). Kewenangan yang telah diberikan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diperhatikan ialah aspek akuntabilitas publik dan transparansi. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah telah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus keuangannya sehingga pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan tersebut harus merepresentasikan asas transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan suatu daerah yang didalamnya tercermin semua transaksi-transaksi maupun kegiatan operasional yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintahan yang terdiri dari tujuh (7) komponen laporan keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemerintah daerah merupakan entitas pelaporan yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, salah satu laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah antara lain Laporan Arus Kas (LAK).

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas Operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal kas, penerimaan, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Laporan Arus Kas sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun pengguna laporan keuangan pemerintah, karena dengan adanya laporan arus dapat memberikan informasi atau gambaran mengenai mutasi kas yang terjadi akibat dari adanya aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Laporan Arus Kas juga memuat mengenai bagaimana pengaruh aktivitas-aktivitas pemerintah daerah dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris (non anggaran) terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah serta sebagai salah satu sarana untuk mengukur atau memprediksi kondisi keuangan pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Oleh karena itu informasi yang didapatkan dari laporan arus kas itu sendiri bisa menjadi acuan untuk menilai kinerja

keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan merupakan kemampuan atau pencapaian suatu entitas dalam mengendalikan dan mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki. Menurut Mahmudi (2019:89) kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan terdapat dua entitas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dalam hal ini yang termasuk dalam entitas pelaporan salah satunya adalah pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Kupang sebagai pemerintah daerah yang telah diberikan tugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk pembangunan maupun sarana dan prasarana publik demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. Namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Kupang membutuhkan dana yang cukup, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun transfer pemerintah pusat agar dapat merealisasikan target-target yang akan dicapai guna meningkatkan pelayanan publik. Dengan diterimanya dana dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pemerintah pusat maka pemerintah Kota Kupang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah, yang salah satunya adalah Laporan Arus Kas. Laporan arus kas memiliki manfaat sebagai sarana untuk

mengetahu penyebab terjadinya surplus atau defisit anggaran, untuk memprediksi kemampuan fiskal pemerintah daerah di masa yang akan datang, serta untuk memprediksi kesinambungan fiskal pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah Kota Kupang wajib menyusun Laporan Arus Kas agar pemerintah Kota Kupang dapat mengetahui bagaimana mutasi kas dari kegiatan yang telah dilakukan dan juga sebagai sarana untuk mengukur dan memprediksi keuangan Pemerintah Kota Kupang dimasa yang akan datang.

Data Laporan Arus Kas pada Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun anggaran 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2018-2021**

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018 Rp	2019 Rp	2020 Rp	2021 Rp
1	Arus kas bersih dari aktivitas Operasi	283.867.052.635,75	232.815.099.236,90	202.045.209.727,12	127.418.979.576,59
2	Arus kas bersih dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(291.103.993.117,80)	(246.106.433.114,26)	(219.502.147.472,00)	(151.092.973.804,47)
3	Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	(4.972.950.000,00)	15.500.000,00	(5.000.000.000,00)	-
4	Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	102.427.500,00	(40.773.582,00)	136.363.146,00	820.659.562,00
5	Kenaikan/ Penurunan Kas	(12.107.462.982,05)	(13.316.607.432,36)	(22.320.574.598,88)	(22.853.334.665,88)

*Sumber: Kantor badan Keuangan dan aset daerah kota kupang*

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas terlihat bahwa Laporan Arus Kas yang terjadi pada Pemerintah Kota Kupang dari Tahun 2018-2021 yaitu Jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi tahun 2018 sebesar Rp. 283.867.052.635,75, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

pada tahun 2018 sebesar (Rp. 291.103.993.117,80), selanjutnya pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.972.950.000,00, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup besar sebesar Rp. 15.500.000,00, selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.000.000.000,00, sedangkan pada tahun 2021 jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan adalah nihil. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2018 sebesar Rp. 102.427.500,00, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 40.773.582,00 sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan.

Kondisi keuangan yang baik seharusnya memiliki arus kas yang stabil. Arus kas yang stabil disini berarti bahwa, laporan arus kas yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Jika dilihat dari laporan arus kas yang dihasilkan pemerintah Kota Kupang terlihat bahwa arus kas aktivitas investasi cenderung menurun dan bersaldo negatif yang mana hal ini menunjukkan adanya defisit anggaran dimana pemerintah mengeluarkan dana yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah Kota Kupang. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Kupang dari Tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan penurunan kas atau dengan kata lain arus kas mengalami fluktuasi yang mana hal ini mengindikasikan ketidakstabilan kinerja keuangan pemerintah daerah dan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan keuangan ditahun berikutnya.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas yang berfluktuasi atau mengalami peningkatan dan penurunan mengindikasikan penurunan kinerja keuangan. Gaudentius (2022) dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa arus kas yang mengalami keadaan fluktuasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja keuangan serta arus kas investasi yang mengalami defisit dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada aktivitas lain dalam laporan arus kas di tahun yang akan datang pada pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018-2021 “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang Jika Dilihat Dari Analisis Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2019-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jika Dilihat Dari Analisis Laporan Arus Kas

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, kemampuan maupun pengetahuan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan laporan arus kas.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman maupun masukan mengenai hasil analisis arus kas tahun anggaran 2018-2021.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai Analisis Arus Kas.